

**PERAN ASEAN DALAM MENDORONG KERJASAMA PENANGGULANGAN
BENCANA DI ASIA TENGGARA: STUDI KASUS PADA MEKANISME ASEAN
AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE
(AADMER)**

**Amni Umniatusyarifah¹⁾, Asyifa Amani Fatihah²⁾, Fawaz Indra Fatta³⁾,
Muhammad Miftah Babil Yasar⁴⁾, Zahra Azmi Lestari⁵⁾, Jaliludin Muslim⁶⁾**
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105,
amiiumnatusyarifah@gmail.com, amaniisyfa18@gmail.com,
fawwazindrafatta220224@gmail.com, abilyasar04@gmail.com,
lestarizahraazmi@gmail.com, jaliludin@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara melalui mekanisme ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER). Kawasan Asia Tenggara yang terletak di wilayah Ring of Fire memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga menuntut adanya koordinasi regional yang efektif dan terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis dinamika kerja sama regional, fungsi kelembagaan ASEAN, serta efektivitas implementasi AADMER. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual ASEAN telah membangun kerangka kerja yang cukup komprehensif melalui AADMER dan memperkuat koordinasi melalui AHA Centre. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti penerapan prinsip non-intervensi, perbedaan kapasitas antarnegara anggota, serta kompleksitas birokrasi yang memperlambat respons darurat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan implementasi di lapangan, sehingga kerja sama yang terjalin masih cenderung bersifat koordinatif dan belum sepenuhnya operasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas institusional, penyederhanaan prosedur koordinasi, serta peningkatan komitmen politik negara anggota guna menciptakan sistem respons bencana yang lebih efektif, cepat, dan terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: ASEAN, AADMER, kerja sama regional, manajemen bencana, Asia Tenggara.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in strengthening disaster management cooperation in Southeast Asia through the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER). The Southeast Asian region, located within the Ring of Fire, is highly vulnerable to various natural disasters, thus requiring effective and integrated regional coordination. This research employs a qualitative approach using a literature review method to analyze the dynamics of regional

cooperation, ASEAN's institutional role, and the effectiveness of AADMER implementation. The findings indicate that, at the normative level, ASEAN has established a relatively comprehensive framework through AADMER and enhanced coordination through the AHA Centre. However, in practice, several challenges persist, including the principle of non-interference, disparities in capacity among member states, and bureaucratic complexities that hinder rapid emergency response. These issues reflect a gap between the normative framework and its practical implementation, resulting in cooperation that remains largely coordinative rather than fully operational. Therefore, strengthening institutional capacity, simplifying coordination mechanisms, and enhancing political commitment among member states are essential to develop a more effective, responsive, and integrated disaster response system in Southeast Asia.

Keywords: ASEAN, AADMER, regional cooperation, disaster management, Southeast Asia

PENDAHULUAN

Secara teoritis, organisasi regional seperti ASEAN dipandang mampu menjadi aktor penting dalam mendorong kerja sama penanggulangan bencana melalui mekanisme kolektif yang terkoordinasi, efektif, dan responsif. Melalui pembentukan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), ASEAN berupaya mewujudkan prinsip "One ASEAN, One Response" sebagai bentuk solidaritas regional dalam menghadapi bencana. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara konsep ideal tersebut dengan realitas di lapangan. Implementasi AADMER masih menghadapi berbagai kendala seperti prinsip non-intervensi yang membatasi intervensi cepat antarnegara, perbedaan kapasitas antar negara anggota, serta hambatan birokrasi yang memperlambat respons pada fase darurat (Ramsi et al., 2025). Selain itu, lemahnya koordinasi dan masih adanya kompleksitas prosedur dalam implementasi kebijakan regional turut menghambat efektivitas respons bencana di Kawasan (Triyana et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan penanggulangan bencana yang cepat dan terintegrasi di Asia Tenggara.

Secara empiris, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah paling rawan bencana di dunia karena letak geografisnya yang berada di kawasan Ring of Fire, sehingga meningkatkan frekuensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi (Sari et al., 2020). Tingginya kerentanan tersebut mendorong ASEAN membentuk AADMER sebagai kerangka kerja hukum regional untuk meningkatkan kerja sama penanggulangan bencana sejak disepakati pada tahun 2005 dan mulai berlaku pada 2009 (Maqfirah et al., 2022). Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa

implementasi AADMER masih sangat bergantung pada kapasitas nasional masing-masing negara anggota, sehingga koordinasi regional belum berjalan secara optimal. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan peran ASEAN dalam mendorong sinergi, koordinasi, dan efektivitas kerja sama penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara (Maqfirah et al., 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran ASEAN dalam penanggulangan bencana melalui mekanisme AADMER. Penelitian oleh Maqfirah et al., (2022) yang berjudul Peran ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia menjelaskan bahwa AADMER menjadi kerangka kerja regional yang mendorong Indonesia mengadopsi mekanisme pengurangan risiko bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan kapasitas domestik dan koordinasi antarnegara.

Penelitian dalam artikel AHA Centre: Implikasi terhadap Disaster Management di Kawasan ASEAN (2017) menyoroti pentingnya AHA Centre sebagai pusat koordinasi informasi, mobilisasi bantuan, dan penguatan kapasitas kawasan dalam menghadapi bencana di Asia Tenggara (Risk et al., 2017). Kedua penelitian tersebut lebih banyak menyoroti implementasi kelembagaan dan peran pusat koordinasi ASEAN, sedangkan penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional mendorong kerja sama penanggulangan bencana melalui efektivitas mekanisme AADMER secara menyeluruh di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Association of Southeast Asian Nations dalam mendorong kerja sama penanggulangan bencana di Asia Tenggara melalui mekanisme ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Penelitian ini penting dilakukan karena kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, dan badai tropis, sehingga diperlukan koordinasi regional yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hubungan internasional dan regionalisme ASEAN, khususnya terkait kerja sama kemanusiaan dan manajemen bencana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat implementasi AADMER, meningkatkan kesiapsiagaan kolektif, serta

membangun sistem respons bencana yang lebih cepat, terkoordinasi, dan tangguh di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Bencana

Kerja sama internasional merupakan mekanisme penting dalam menghadapi permasalahan global yang tidak dapat diselesaikan secara individual oleh suatu negara. Dalam perspektif Robert O. Keohane, kerja sama antarnegara terbentuk karena adanya kepentingan bersama serta kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi internasional (Keohane, 1984). Dalam konteks penanggulangan bencana, kerja sama internasional menjadi krusial karena bencana seringkali memiliki dampak lintas batas serta membutuhkan mobilisasi sumber daya yang cepat dan terkoordinasi.

Alexander Wendt menekankan bahwa kerja sama juga dipengaruhi oleh norma dan identitas bersama yang terbentuk antarnegara (Wendt, 1999). Dalam konteks ASEAN, norma solidaritas regional dan prinsip kebersamaan menjadi faktor penting dalam mendorong terbentuknya kerja sama penanggulangan bencana. Hal ini tercermin dalam komitmen negaraganggota ASEAN untuk membangun mekanisme kolektif melalui AADMER sebagai bentuk respons terhadap ancaman bencana di kawasan.

Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction, kerja sama internasional dalam pengurangan risiko bencana menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif, berbasis risiko, serta berorientasi pada pencegahan (UNDRR, 2015). Dengan demikian, kerja sama internasional tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.

Peran Institusi Regional dalam Tata Kelola Bencana

Institusi regional memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan negaraganggota serta meningkatkan efektivitas kerja sama lintas negara. Dalam perspektif James G. March dan Johan P. Olsen, institusi berfungsi sebagai struktur yang membentuk perilaku aktor melalui norma, aturan, dan prosedur yang terlembaga. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran penting dalam membangun kerangka kerja sama penanggulangan bencana melalui berbagai mekanisme kelembagaan.

Keberadaan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response menjadi bukti konkret upaya ASEAN dalam membentuk sistem tata kelola bencana yang

terintegrasi di kawasan Asia Tenggara. AADMER tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi yang mengatur kerja sama antarnegara dalam fase mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana (Secretariat, 2015).

Selain itu, pembentukan AHA Centre memperkuat kapasitas institusional ASEAN dalam mengelola informasi dan koordinasi bantuan saat terjadi bencana (Risk et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa institusi regional memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas respons kolektif melalui mekanisme yang terstruktur dan terkoordinasi.

Implementasi AADMER dan Tantangan di Kawasan ASEAN

Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang komprehensif melalui AADMER, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Maqfirah et al., (2022) menunjukkan bahwa implementasi AADMER sangat dipengaruhi oleh kapasitas nasional masing-masing negara anggota, sehingga efektivitas kerja sama regional belum optimal. Perbedaan sumber daya, infrastruktur, serta tingkat kesiapsiagaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, penelitian oleh Triyana et al., (2022) menekankan bahwa kompleksitas prosedur dan birokrasi dalam mekanisme ASEAN turut menghambat respons cepat dalam situasi darurat. Hal ini diperkuat oleh Ramsi et al., (2025) yang menyatakan bahwa prinsip non-intervensi ASEAN seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan respons kolektif, karena membatasi intervensi langsung antarnegara anggota.

Kawasan Asia Tenggara yang berada di wilayah Ring of Fire memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi, sehingga membutuhkan sistem respons yang cepat dan terintegrasi (Sari et al., 2020). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi regional masih belum sepenuhnya efektif dalam menjawab tantangan tersebut.

Research Gap (Celah Penelitian)

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek kelembagaan, seperti peran AHA Centre dan implementasi AADMER di tingkat nasional. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional secara keseluruhan mendorong efektivitas kerja sama penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara.

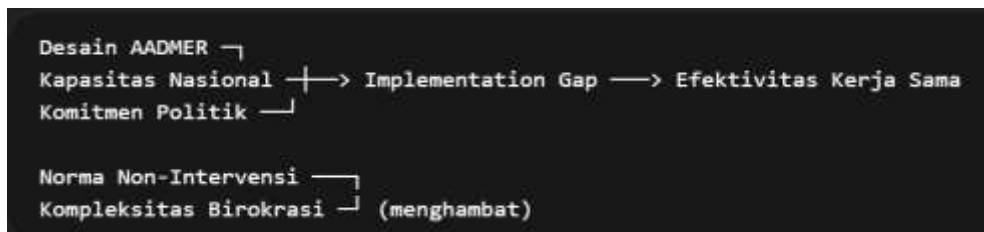
Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran ASEAN tidak hanya sebagai forum kerja sama, tetapi juga sebagai institusi regional yang

memiliki kapasitas normatif dan koordinatif dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terintegrasi.

KERANGKA BERPIKIR

Meskipun ASEAN melalui ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) sering dianggap sebagai kemajuan dalam tata kelola bencana regional, efektivitasnya dalam praktik masih terbatas. Regionalisme harus dielaborasi sebagai konsep yang menjelaskan jalur bagi negara-negara dengan kedekatan geografis untuk terikat berdasarkan kesamaan latar belakang mereka. Juga, visi dan misi yang sama dapat dimobilisasi untuk melakukan tindakan bersama. Konsep ini diwujudkan dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan rezim internasional seperti AADMER (Erika, n.d.).

AADMER lebih berfungsi sebagai kerangka normatif daripada instrumen operasional yang mampu menghasilkan respons kolektif yang cepat dan terintegrasi. Secara empiris, penanggulangan bencana di Asia Tenggara masih didominasi oleh kapasitas nasional, bukan oleh mekanisme regional. Hal ini menunjukkan bahwa peran ASEAN tetap berada pada level koordinatif, bukan operasional. ASEAN sangat mempertegas dirinya yang sebagai suatu organisasi internasional yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang masih saat ini menjunjung tinggi suatu prinsip non intervensi yang diberlakukan kepada kesepuluh negara anggota ASEAN (Maqfirah et al., 2022).



Dengan demikian, penguatan kerangka normatif saja tidak cukup. Efektivitas kerja sama hanya dapat dicapai melalui transformasi operasional, termasuk penyederhanaan koordinasi, peningkatan kapasitas kolektif, dan komitmen nyata dalam berbagi sumber daya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa fokus kajian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kebijakan dan

dinamika kerja sama regional, bukan pada pengujian hubungan kausal secara statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, pola, serta proses yang berkembang dalam suatu kebijakan melalui penafsiran terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskripsi yang rinci dan kontekstual sehingga mampu menggambarkan kondisi yang diteliti secara lebih utuh dan mendalam (Nugrahani, 2014). Oleh karena itu, metode ini dinilai sesuai untuk mengkaji peran ASEAN dalam mendorong kerja sama penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan isu kebijakan publik dan hubungan internasional dengan kompleksitas institusional yang tinggi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau studi pustaka, yakni pendekatan yang berfokus pada penelusuran dan pengkajian sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi literatur dimanfaatkan untuk menelaah hasil penelitian sebelumnya, gagasan konseptual para akademisi, serta publikasi ilmiah yang membahas kerja sama regional, tata kelola penanggulangan bencana, dan peran organisasi internasional. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dibahas dan dievaluasi dalam kajian akademik, sekaligus melihat kontribusi ASEAN dalam membangun kerangka kerja sama penanggulangan bencana di Asia Tenggara. Selain itu, studi literatur membantu peneliti dalam menyusun argumen secara runtut berdasarkan akumulasi pengetahuan ilmiah yang telah ada (Zed, 2003).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa landasan teori sebagai kerangka analisis. Pertama, teori kerja sama internasional yang menjelaskan bahwa kerja sama antarnegara terbentuk ketika negara-negara menghadapi permasalahan bersama yang tidak dapat diselesaikan secara individual, sehingga mendorong pembentukan kesepakatan, aturan, dan mekanisme kolektif untuk mencapai kepentingan bersama (Keohane, 1984). Dalam konteks penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara, teori ini digunakan untuk menjelaskan dasar rasional kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi ancaman bencana yang bersifat lintas batas melalui mekanisme regional yang terkoordinasi.

Kedua, teori institusionalisme dalam hubungan internasional yang menekankan peran institusi regional dalam membentuk perilaku negara melalui norma, aturan, dan struktur kelembagaan yang berkelanjutan (March & Olsen, 1989). Teori ini memandang bahwa institusi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum dialog, tetapi juga sebagai aktor yang

mampu meningkatkan efektivitas kerja sama dan mengurangi ketidakpastian antarnegara. Dalam penelitian ini, teori institusionalisme digunakan untuk menganalisis peran kelembagaan ASEAN dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan mekanisme penanggulangan bencana melalui ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) sebagai kerangka kerja sama regional yang bersifat formal dan berkelanjutan.

Kedua teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menganalisis bagaimana ASEAN tidak hanya berperan sebagai wadah kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai institusi regional yang memiliki kapasitas normatif dan koordinatif dalam mendorong efektivitas kerja sama penanggulangan bencana di Asia Tenggara. (Secretariat, 2005)

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah literature review, yaitu proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, serta penyintesisan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain kesesuaian dengan topik kajian, tingkat kredibilitas sumber, serta relevansinya terhadap tujuan penelitian. Literatur yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan tema-tema utama, pola pemikiran yang dominan, serta celah penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya. Literature review dipahami sebagai pendekatan yang terstruktur dan dapat direplikasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti dan praktisi (Ramdhani et al., 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber literatur dengan cara membandingkan berbagai artikel jurnal, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu guna memastikan konsistensi serta keandalan informasi yang digunakan. Analisis penelitian difokuskan pada peran kelembagaan ASEAN, mekanisme kerja sama regional, serta efektivitas AADMER sebagaimana dibahas dalam literatur akademik. Adapun batasan penelitian ini adalah tidak mengkaji secara mendalam aspek implementasi teknis penanggulangan bencana di tingkat nasional negara-negara anggota ASEAN serta tidak melakukan analisis kuantitatif terhadap dampak kebijakan. Penetapan batasan tersebut dimaksudkan agar pembahasan tetap terfokus dan selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah membangun arsitektur kerja sama penanggulangan bencana yang relatif komprehensif melalui ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Dalam kerangka Robert O. Keohane, institusi internasional berfungsi menurunkan biaya transaksi, menyediakan informasi, dan meningkatkan kepatuhan melalui aturan bersama (Keohane, 1984). Secara normatif, AADMER memenuhi fungsi tersebut dengan menetapkan prosedur koordinasi, pembagian peran, dan standar respons regional. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, melainkan juga oleh derajat kepatuhan dan kapasitas implementasi di tingkat nasional (Keohane, 1984).

Secara kelembagaan operasional, pembentukan AHA Centre menjadi instrumen kunci dalam orkestrasi respons regional mulai dari *information management*, *situation update*, hingga mobilisasi bantuan lintas negara (Secretariat, 2015). Dalam perspektif institusionalisme, peran ini memperlihatkan bagaimana aturan dan prosedur dapat mengarahkan perilaku aktor menuju koordinasi yang lebih efisien (March & Olsen, 1989). Meski demikian, studi empiris menunjukkan bahwa kapasitas AHA Centre masih sangat bergantung pada kontribusi negara anggota, baik dalam pendanaan maupun ketersediaan aset respons, sehingga ketergantungan ini membatasi otonomi operasional institusi (Caballero-Anthony, 2018).

Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan ASEAN melalui AADMER masih belum mampu menembus hambatan struktural yang bersumber dari prinsip kedaulatan negara, sehingga kerja sama yang dibangun cenderung berhenti pada level koordinatif, bukan operasional., prinsip *non-interference* yang melekat pada ASEAN membatasi ruang intervensi cepat antarnegara, sehingga memperlambat *collective response* pada fase awal bencana (Emmers, 2003). Kedua, terdapat kesenjangan kapasitas nasional yang signifikan dari sistem peringatan dini, logistik, hingga kesiapsiagaan yang berdampak pada ketidaksinkronan respons regional. Ketiga, kompleksitas prosedur dan jalur komando dalam koordinasi lintas negara menambah *time lag* pada distribusi bantuan (Triyana et al., 2022). Dalam terminologi implementasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan *implementation gap* antara desain normatif dan praktik lapangan (Pressman & Wildavsky, 1984).

Dari kacamata konseptual, pendekatan ASEAN masih cenderung koordinatif–intergovernmental, belum mencapai tingkat integrasi operasional yang memungkinkan *rapid*

deployment tanpa hambatan politik-birokratis. Hal ini kontras dengan tuntutan kawasan Asia Tenggara yang berada di wilayah Ring of Fire dengan frekuensi bencana tinggi, sehingga membutuhkan respons yang cepat, terstandar, dan *interoperable* (UNDRR, 2015). Akibatnya, prinsip “One ASEAN, One Response” seringkali berhenti pada level normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik lintas negara (Secretariat, 2016).

Sudut pandang kepatuhan institusional, efektivitas AADMER juga dipengaruhi oleh variasi komitmen politik dan prioritas domestik tiap negara anggota. Teori kepatuhan menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya dipicu oleh sanksi, tetapi juga oleh *norm internalization* dan *reputational concerns* (Abbott et al., 2000). Dalam konteks ASEAN yang minim mekanisme penegakan (*enforcement*), kepatuhan lebih banyak bergantung pada kemauan politik (*political will*). Hal ini menjelaskan mengapa standar operasional yang sama dapat menghasilkan keluaran implementasi yang berbeda antarnegara.

Dengan demikian, terdapat indikasi perbaikan melalui penguatan mekanisme regional misalnya peningkatan kapasitas *Emergency Operations Centre*, latihan bersama (*joint exercises*), dan pengembangan *ASEAN-ERAT* (Emergency Response and Assessment Team) untuk mempercepat penilaian kebutuhan di lapangan (Secretariat, 2015). Upaya ini menunjukkan pergeseran dari sekadar koordinasi menuju penguatan kapabilitas kolektif. Namun, tanpa penyederhanaan prosedur dan peningkatan komitmen berbagi sumber daya, efektivitasnya akan tetap terbatas.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama penanggulangan bencana di ASEAN tidak cukup ditopang oleh desain kelembagaan yang komprehensif, tetapi sangat ditentukan oleh kapasitas nasional, komitmen politik, serta derajat integrasi operasional. ASEAN telah berhasil membangun fondasi normatif melalui AADMER dan memperkuat koordinasi melalui AHA Centre, namun masih menghadapi kendala struktural yang menghambat respons cepat dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan *institutional capacity*, penyederhanaan mekanisme koordinasi, serta peningkatan *resource pooling* agar kerja sama regional dapat bertransformasi dari sekadar koordinatif menjadi responsif dan operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Association of Southeast Asian Nations melalui ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response telah

berhasil membangun fondasi kerja sama regional yang komprehensif dalam penanggulangan bencana di Asia Tenggara. Secara normatif, kerangka kerja ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif negara-negara anggota terhadap pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman bencana yang bersifat lintas batas (Keohane, 1984). Selain itu, keberadaan AHA Centre turut memperkuat kapasitas koordinasi regional melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Namun efektivitas implementasi kerja sama tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan institusional. Prinsip non-intervensi, perbedaan kapasitas nasional, serta kompleksitas koordinasi lintas negara menyebabkan kerja sama yang terbangun cenderung berhenti pada level koordinatif, dan belum sepenuhnya berkembang menjadi kerja sama yang operasional dan responsif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kerangka normatif yang telah dirancang dengan praktik implementasi di lapangan (Pressman & Wildavsky, 1984). Dengan demikian, kekuatan utama ASEAN terletak pada kemampuannya dalam membangun norma dan kerangka kerja sama, namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek eksekusi dan integrasi operasional.

Demikian juga tantangan utama kerja sama penanggulangan bencana di ASEAN bukan terletak pada ketiadaan kerangka kebijakan, melainkan pada keterbatasan kapasitas institusional dalam mengimplementasikan kerja sama tersebut secara efektif. Oleh karena itu, transformasi menuju kerja sama yang lebih operasional, responsif, dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas kolektif, penyederhanaan mekanisme koordinasi, serta peningkatan komitmen negara anggota dalam berbagi sumber daya dan informasi guna meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko bencana di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A.-M., & Snidal, D. (2000). The Concept of Legalization. *International Organization*, 54(3), 401–419. <https://doi.org/10.1162/002081800551271>
- Caballero-Anthony, M. (2018). Disaster Management in Southeast Asia: ASEAN's Response. *Asian Security*, 14(2), 1–20.
- Emmers, R. (2003). *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*. Routledge.
- Erika. (n.d.). *meneropong prinsip non intervensi yang masih melingkar dalam asean*. 3.

- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Maqfirah, A. D., Guntur, N. O., Burhanuddin, A., & Monica, K. A. (2022). Peran ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1).
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A Step-by-Step Approach. *International Journal of Basics and Applied Sciences*, 3(1), 47–56.
- Ramsi, O., Agung, A., Perwita, B., & Hendarwoto, Y. (2025). Indonesia's Defense Diplomacy in Advancing ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) as a Regulatory Basis for ASEAN First Responder Formation. *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences*, 3(3), 1220–1232.
- Reduction, U. N. O. for D. R. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. United Nations.
- Risk, D., Drr, R., & Indonesia, D. I. (2017). United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction) 1990-1999. *SOSFILKOM*, XI(01).
- Sari, S., Jenderal, U., & Yani, A. (2020). ASEAN Mechanism in Disaster Management : A Case Study of Disaster Management in Indonesia 2010-2020. *Jurnal Global Strategis*, 75–108.
- Secretariat, A. (2005). *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response*.
- Secretariat, A. (2015). *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme*. ASEAN.
- Secretariat, A. (2016). *One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One*. ASEAN.
- Triyana, H. J., Harjono, N. P., & McDermott, R. (2022). Implementing the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response for Better Coordination and Simplification Procedures A . Introduction Disasters , complex emergency and conflicts have marked as regional. *Jambe Law Journal*, 5(2), 147–205. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.147-205>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.